

BAB II

Tinjaun Pustaka

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori agensi

Teori agensi merupakan teori yang menyebabkan timbulnya manajemen laba yang mana manajer berusaha untuk bertanggungjawab mengoptimalkan keuntungan bagi para pemilik(principal),akan memperoleh imbalan sesuai dengan kontrak yang sudah disetujui.

Dengan begitu terjadi ada dua kepentingan yang berbeda dalam sebuah perusahaan. Yang mana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai dan mempertahankan kemakmuran yang diharapkan oleh manajer sebagai pengelola perusahaan, yang mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik(pemegang saham). Sinyal yang diberikan kepada pemilik berupa pengungkapan informasi akutansi seperti laporan keuangan perusahaan. Sedangkan pihak principal termotivasi untuk mengadakan kontrak untuk kesejahteraan dirinya melalui pembagian deviden atau kenaikan harga saham perusahaan.

Dengan perbedaan kepentingan ini, maka meningkatnya konflik antara agen dan principal, ketika principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent karena ketidaksanggupan principal mengamati aktivitas agent dalam perusahaan. Agent mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan agent biasanya disebut dengan istilah asimetri informasi. Asimetri informasi dan konflik kepentingan terjadi karena mendorong pihak agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak sesuai kenyataan kepada principal, terutama informasi tersebut berkaitan kinerja agent (Kanji, 2018)

2.2.1 Teori Akutansi Positif

Teori akutansi positif ini berkaitan dengan manajemen laba karena pada teori ini sebagai dasar untuk memahami pelaporan keuangan dan bagaimana perusahaan membuat dan menyampaikan laporan keuangannya dengan menggunakan strategi yang tepat.

Manfaat teori akuntansi dapat digunakan untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang kejadian yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan perusahaan. Hal ini dapat berimbas dalam pengambilan keputusan dengan pertimbangan dan pengukuran tingkat resiko.

Teori akuntansi positif dipelopori oleh Watts dan Zimmerman (1986) dalam (Villela, 2013) yang menjelaskan bahwa teori akuntansi positif mengakui tiga hubungan keagenan, yaitu antara manajemen dengan pemilik (the bonus plan hypothesis), antara manajemen dengan kreditur (the debt to equity hypothesis), antara manajemen dan pemerintah (the political cost hypothesis).

2.1.2.1 The Bonus Plan Hypothesis

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan. Suatu keberhasilan manajer dapat diukur berdasarkan besarnya tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan setiap tahun. Jika perusahaan memperoleh keuntungan maka manajer tersebut akan mendapatkan bonus yang maksimal.

2.1.2.2 The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis)

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan didalam perjanjian utang (debt covenant). Sebagian besar kontrak utang yang mana memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh peminjam selama periode kontak pinjaman. Ketika perusahaan mulai menghadapi ancaman pelanggaran terhadap perjanjian utang, maka manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian utang tersebut dengan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba atau keuntungan. Pelanggaran terhadap perjanjian utang dapat mengakibatkan sanksi yang pada akhirnya akan membatasi tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan meningkatkan laba (income increasing) untuk menghindar atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian (Sweeney, 1994)

2.1.2.3 The Political Cost Hypothesis

Perusahaan yang berurusan dengan biaya politik cenderung memanipulasi penurunan keuntungan untuk meminimalkan biaya politik yang ditanggung oleh perusahaan. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya (Scott, 2000).

2.1.3 Perencanaan Pajak

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof.Dr.Rochmat Soemitro,S.H dalam buku (Siti resmi edisi 10,2017)”pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Maka setiap wajib pajak badan mencari cara untuk meminimalkan pengeluaran untuk pembayaran pajak dengan *planning*(perencanaan pajak).Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha,namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran peraturan perpajakan. Perencanaan pajak adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal(Citra Fitriany, 2016). Sedangkan menurut (Yunila & Aryati, 2018) Perencanaan perpajakan bukanlah kegiatan illegal melainkan perencanaan pajak merupakan kegiatan yang diizinkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perpajakan yang ada.

Dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu strategi seorang manajer perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak,yaitu dengan cara melakukan perencanaan pajak yang mana tujuannya meminimalkan pembayaran pajak agar mendapatkan hasil laba yang maksimal tanpa melanggar undang-undang pajak.

2.1.3.1 Jenis-jenis perencanaan pajak dibagi atas dua (Puji Astutik, 2016) yaitu sebagai berikut:

2.1.3.1.1 Perencanaa pajak nasional(national tax planning)

Perencanaan pajak nasional dilakukan oleh wajib pajak apabila hanya memiliki urusan diIndonesia saja atau melakukan transaksi dalam negeri.Perencanaan pajak nasional ini hanya memperhatikan Undang-Undang domestik,saat melakukan pemilihan transaksi,artinya untuk menghindari atau mengurangi beban pajak wajib pajak dapat memilih jenis transaksi apa yang harus dilaksanakan sesuai hukum pajak.

2.1.3.1.2 Perencanaan pajak internasional(international tax planning)

Perencanaan pajak ini dilakukan oleh wajib pajak yang melakukan bisnis didalam maupun diluar negeri.perencanaan perpajakan juga dilaksanakan jika wajib pajak melakukan transaksi dengan wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar

negeri. Berbeda dengan National Tax Planning yang hanya memperhatikan Undang-Undang Domestik saja, sedangkan International Tax Planning juga harus memperhatikan Undang-Undang atau perjanjian pajak (Tax Treaty) dari negara-negara yang ikut terlibat.

2.1.3.2 Dalam perencanaan pajak, diperlukan ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengefisiensi beban pajak secara legal (Villela, 2013) yaitu sebagai berikut:

2.1.3.2.1 Tax Avoidance

Strategi yang bisa dilakukan dengan menghindari dari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Dalam hal ini, perusahaan harus menaati peraturan pajak dan tidak melanggarnya sehingga tidak dikenakan sanksi berupa denda. Contoh penerapan tax avoidance yaitu semaksimal mungkin memberikan kesejahteraan kepada karyawan, dengan cara mengalokasikan dana dalam bentuk natura. Mengingat bahwa pemberian natura pada perusahaan yang tidak terkena PPh Final bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21.

2.1.3.2.2 Tax saving (penghematan pajak)

Upaya untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memilih alternatif pengenaan pajak yang memiliki tarif pajak yang rendah dan lebih selektif untuk mengatur objek pajak yang akan mengurangi pengenaan pajak. Contoh penerapan tax saving adalah pemberian natura kepada karyawan pada umumnya tidak dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh badan. Maka perusahaan memberikan kebijakan dalam pemberian natura dalam hal beras dapat diubah menjadi natura dalam bentuk uang. Maka natura (uang) dimasukkan sebagai penghasilan karyawan yang dapat dikurangi sebagai biaya.

2.1.3.2.3 Penundaan pembayaran pajak

Penundaan pembayaran pajak bisa dilakukan tanpa melanggar aturan. Misalnya bahwa untuk menunda pembayaran PPN dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak sampai batas waktu yang ditentukan, terutama atas penjualan kredit, dimana penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan pajak.

2.1.3.2.4 Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan

yaitu melakukan strategi perencanaan pajak, manajer harus menguasai berbagai ketentuan dan peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar aturan tersebut, maka tidak akan dikenakan sanksi.

2.1.3.3 Tahapan dalam Pembuatan Perencanaan Pajak, menurut Suandy (2011: 13) dalam (Dian et al., 2013) mengemukakan bahwa sebuah perencanaan pajak dapat dikatakan

berhasil sesuai harapan jika,rencana itu dilakukan berbagai urutan tahap-tahap sebagai berikut:

2.1.3.3.1 Menganalisis informasi (Basis Data) yang ada

Tahap pertama dari perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Dengan ini, harus dipertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara individu maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang lebih efisien. Untuk itu seorang manajer harus memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan memperhatikan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak.

2.1.3.3.2 Buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak

Pada tahap kedua ini memilih bentuk transaksi atau hubungan internasional. Hampir semua sistem perpajakan internasional, dimana setidaknya ada dua negara yang ditentukan terlebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak boleh melampaui langkah-langkah pemerintah transaksi, operasi dan hubungan yang paling menguntungkan.

2.1.3.3.3 Evaluasi atas perencanaan pajak

Perencanaan pajak yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategi perusahaan. Sehingga perlu dilakukan penilaian untuk melihat sejauh mana hasil pengaruh penerapan suatu rencana perpajakan terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran biaya bukan pajak atas berbagai perencanaan alternatif.

2.1.3.3.4 Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Bahwa baik atau tidaknya hasil suatu rencana pajak dinilai melalui berbagai perencanaan yang dibuat. Tindakan perubahan harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya dan kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal. Jadi, akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan tentang berapa peluang kesuksesan dan berapa laba yang akan diperoleh jika berhasil maupun berapa kerugian jika terjadi kegagalan.

2.1.3.3.5 Memuktahirkan rencana pajak

Walaupun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu dilakukan perhitungan setiap perubahan yang terjadi, dan melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan perencanaan pajak sehingga perencanaan

tersebut tetap berjalan berdasarkan undang-undang pajak maupun pelaksanaannya (negara di mana aktivitas tersebut dilakukan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.

2.1.3.4 Ada beberapa manfaat perencanaan pajak yang bisa diperoleh perusahaan diungkapkan oleh (Kesuma, 2010) yaitu

2.1.3.4.1 Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.

2.1.3.4.2 Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

2.1.4 Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan yaitu beban pajak atau manfaat yang dapat menambah dan mengurangi beban pajak pada tahun yang bersangkutan. Beban pajak tangguhan, dapat dipahami dari dua segi sudut pandang akuntansi yaitu sebagai aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Manfaat beban pajak tangguhan yaitu nilai aset atau manfaat dari pajak yang ditangguhkan akan menghapus kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, tidak perlu lagi membayar kewajiban dimasa mendatang. Nilai aset atau manfaat pajak kini berasal dari selisih antara laba menurut akuntansi dan laba menurut pajak.

Suandy(2008:91) dalam (TUNDJUNG, 2015) mengungkapkan bahwa apabila pada masa mendatang akan terjadi pembayaran yang lebih besar, maka berdasarkan SAK harus diakui sebagai suatu kewajiban sedangkan pembayaran yang lebih kecil maka diakui sebagai aset pajak tangguhan. Sebagai contoh jika biaya penyusutan aset tetap yang diakui sebagai komersial bahwa lebih besar daripada biaya penyusutan aset tetap yang diakui dengan basis fiskal. Hal ini akan mengakibatkan biaya komersial yang lebih besar yang diakui dimasa yang akan mendatang. Dengan demikian akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan, sedangkan beban penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial lebih kecil daripada beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal, akan mengakibatkan pengakuan beban pajak komersial akan lebih kecil dimasa yang akan mendatang. Dengan demikian akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan. Perlakuan akuntansi terhadap pajak yang ditangguhkan diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46(PSAK No46)”tentang akuntansi pajak penghasilan” yang resmi dikeluarkan oleh (IAI, 1998). Akuntansi pajak yang ditangguhkan terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

2.1.4.1 *Proses akuntansi pajak yang ditangguhkan adalah sebagai berikut:*

2.1.4.1.1 *pengakuan*

Pengakuan aktiva dalam kewajiban perpajakan yang ditangguhkan dalam laporan keuangan. Artinya bahwa perusahaan yang menyusun laporan keuangan yang dapat mengakui nilai tercatat aset atau akan melunasi nilai tercatat kewajiban.

Pengakuan nilai tercatat sebagai aktiva apabila penghasilan sebelum pajak (PSP-komersil) lebih kecil dari penghasilan kena pajak (PKP Fiskal), akan mengakibatkan beban pajak komersil akan lebih kecil dari pajak terutang/pajak kini. Sedangkan kewajiban pajak tangguhan diakui apabila penghasilan sebelum pajak lebih besar dari penghasilan kena pajak, akan mengakibatkan beban pajak komersil akan lebih besar dari pajak terutang. Perbedaan temporer yang dapat meningkatkan jumlah pajak dimasa yang akan mendatang akan diakui sebagai liabilitas (utang pajak yang ditangguhkan dan perusahaan harus mengakui pajak tangguhan.)

2.1.4.1.2 *Pengukuran*

Pengukuran pajak tangguhan akan dihitung menggunakan tarif yang berlaku sesuai PSAK No 46 paragraf 30. Pengukuran liabilitas dan aset pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan diterapkan pada periode dimana aset akan direalisasikan atau liabilitas yang akan dibayar, yaitu tarif pajak yang efektif berlaku pada tanggal neraca. Secara teknis kewajiban dan aset pajak tangguhan diakui dengan rugi pajak yang bisa dikompensasikan, dan selisih temporer (waktu) antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang dikalikan dengan tarif pajak berlaku.

2.1.4.1.3 *Penyajian*

Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus disajikan secara terpisah dari aset atau liabilitas pajak terkini dan disajikan dalam neraca sebagai unsur non current (tidak lancar) sedangkan beban atau penghasilan (manfaat) pajak yang ditangguhkan harus disajikan tersendiri dengan beban pajak kini dalam laporan laba rugi perusahaan. Aset dan kewajiban pajak yang ditunda harus dibedakan dari aset pajak kini dan kewajiban pajak kini (PSAK No. 46 paragraf 45). Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aset dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aset dan kewajiban tidak lancar, maka aset (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aset (kewajiban) lancar.

2.1.4.1.4 *Pengungkapan*

Pengungkapan pajak tangguhan diatur dalam PSAK No 46 paragraf 56 hingga paragraf 63. Pada paragraf 56 dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan pajak yang ditangguhkan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu:

- Jumlah pajak kini dan pajak yang ditunda berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
- Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut:
 - Rekonsialisasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi serta tarif pajak yang berlaku dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku.
 - Rekonsialisasi antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku.
- Perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya.
- Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut dan diakui sebagai aset pajak yang ditangguhkan pada neraca.

2.1.4 Manajemen Laba

Manajemen laba adalah suatu proses dalam pengambilan langkah yang disengaja dalam batas prinsip akuntansi yang bersifat umum baik itu didalam maupun diluar batas General Accepted Accouting Principle (GAAP). Manajemen laba merupakan tindakan manajer yang memanipulasi laporan keuangan, dimana informasi dalam laporan keuangan tersebut dapat menyebabkan efek bagi perusahaan dan bagi pihak investor. Tindakan manajemen laba ini juga disebabkan oleh kepentingan manajer sendiri dalam meningkatkan nilai perusahaan agar lebih maju sehingga kedepannya para investor tertarik untuk berinvestasi dan meminimalkan beban pajak penghasilan badan yang dikeluarkan perusahaan (Erawati & Lestari, 2019)

2.1.5.1 Fungsi Manajemen Laba

Fungsi manajemen laba digunakan oleh manajer untuk menghindari kecurangan, sehingga perusahaan dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara

berkala. Berikut paparan mengenai fungsi manajemen laba (Nugroho & Darsono, 2015) sebagai berikut:

2.1.5.1.1 Memantau laporan-laporan laba rugi secara terus-menerus

Laporan laba rugi dibuat secara mingguan, bulanan, triwulan, atau tahunan dengan prosedur standar perusahaan. Namun, Akuntan dapat menghasilkan laporan sesuai kebutuhan dan di minta oleh manajemen. Sehingga manajemen terus memperhatikan angka-angkanya dan cari tren dan gunakan untuk memperkirakan dan memproyeksikan laba dan meminimalkan kerugian. Data laba rugi perusahaan menampilkan indikator-indikator seperti pendapatan, pengeluaran, dan laba bersih, atau jika pengeluaran melebihi pendapatan maka akan menunjukkan rugi bersih. Pendapatan berkisar dari pendapatan operasi dan pendapatan bunga hingga kas yang dihasilkan dari investasi atau dalam usaha patungan dengan perusahaan lain. Laporan itu sendiri dapat membantu untuk membuat keputusan bisnis yang terinformasi mencapai keuntungan yang maksimal.

2.1.5.1.2 Menggabungkan Pemantauan laporan laba rugi dan pengeluaran kas

Manajemen laba yang efektif menunjukkan bagaimana perusahaan menghemat uang, menumbuhkan uang tunai yang ada, dan menghindari kehancuran finansial. Hal ini harus dikelola dan dikendalikan serta pemantauan terhadap pengeluaran secara efisien mungkin. Digabungkan dengan laporan laba rugi, manajemen laba membantu bisnis dalam menghemat uang selama bulan-bulan yang masa sulit, dan memiliki daya beli pada bulan-bulan yang kuat untuk berinvestasi dalam produk bisnis baru, infrastruktur, teknologi, tenaga kerja atau aspek apa pun yang diperlukan untuk pertumbuhan bisnis sehingga membantu perusahaan mendapatkan keuntungan.

2.1.5.1.3 Tim Outsourse untuk Manajemen Laba

Bekerjasama dengan mitra solusi keuangan dan akuntansi untuk membangun tim pembukuan dan akuntan publik bersertifikat untuk menghasilkan laporan secara ketat dari sudut pandang akuntansi dapat memberikan perspektif yang berbeda kepada manajer. Tim juga dapat membantu merumuskan formula strategi bisnis untuk membantu pemilik bisnis memahami cara meningkatkan atau menghasilkan lebih banyak keuntungan.

2.1.5.2 Pola manajemen laba

Pada umumnya pola dapat diartikan sebagai sebuah bentuk atau model yang memiliki karakteristik yang mempunyai aturan atau ketentuan. Pola manajemen dapat digunakan dengan cara teratur, sehingga mendapatkan hasil yang sudah direncanakan. Berikut ini ada beberapa paparan pola manajemen diungkapkan oleh (Villela, 2013) yaitu sebagai berikut:

2.1.5.1.1 Taking A Bath

Pola yang pertama adalah pola taking a bath yang dapat diartikan sebagai pola yang digunakan manajemen untuk menghapus beberapa aktiva, dan memperkirakan biaya yang akan datang juga harus dibebankan oleh pihak perusahaan. Dalam pola ini, manajemen juga harus melakukan sesuatu yang disebut sebagai clear the desk. Dengan tujuan laba yang dilaporkan akan meningkat dalam periode berikutnya.

2.1.5.1.2 Income minimization atau Minimal Pendapat

Pola minimal pendapatan atau laba dilakukan karena adanya motif politik atau motif meminimalkan pajak. Pola tersebut dilakukan pada saat terjadinya profit yang didapat oleh perusahaan. Dimana keuntungan yang diraih oleh perusahaan tersebut sangat tinggi. Dengan tujuan agar nantinya tidak mendapat perhatian yang bersifat politik. Dalam pola ini, adanya tindakan yang dapat dilakukan yaitu bentuk saling melakukan penghapusan antara barang modal dan aset perusahaan.

2.1.5.1.3 Income Maximization atau Maksimalisasi Pendapatan

Pola memaksimalkan laba dengan tujuan memperoleh bonus yang lebih besar. Untuk tindakan yang dilakukan pada pola ini adalah untuk menghindari pelanggaran kontrak uang.

2.1.5.1.4 Income Smoothing atau Perataan Laba

Pada pola ini perusahaan memiliki teknik tertentu dalam membuat laporan, yaitu perusahaan lebih memilih melaporkan trend pertumbuhan laba yang stabil daripada menunjukkan hasil laba yang meningkat dan menurun secara drastis.

2.1.5.1.5 Timing Revenue dan Expenses Recognition

Pola ini menggunakan teknik yang dilakukan untuk membuat kebijakan. Adapun kebijakan ini berkaitan dengan waktu yang dilakukan transaksi secara langsung. Misalnya pengakuan premature atas pendapatan.

2.1.5.3 Teknik dalam manajemen laba (Nugroho & Darsono, 2015) yaitu sebagai berikut:

2.1.5.3.1. Memanfaatkan Peluang untuk Membuat Estimasi Akuntansi

Teknik ini merupakan cara manajer untuk mempengaruhi laba melalui penyesuaian terhadap estimasi akuntansi antara lain: estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi.

2.1.5.3.2. Mengubah metode akuntansi

Perubahan metoda akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh: mengubah metoda depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metoda depresiasi garis lurus.

2.1.5.3.3. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Teknik ini biasanya disebut sebagai rekayasa jenis yang digunakan untuk manipulasi dalam mengambil keputusan operasional. Contoh: rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode akuntansi berikutnya, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapaun ringkasan hasil penelitian terdahulu, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Objek/Variabel	Hasil
1	(Suputra, 2017)	Pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba (Studi Empiris Pada Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2013-2014)	Objek: perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015 Variabel: IV : perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan DV : manajemen laba	1. perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba 2. Beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan melakukan

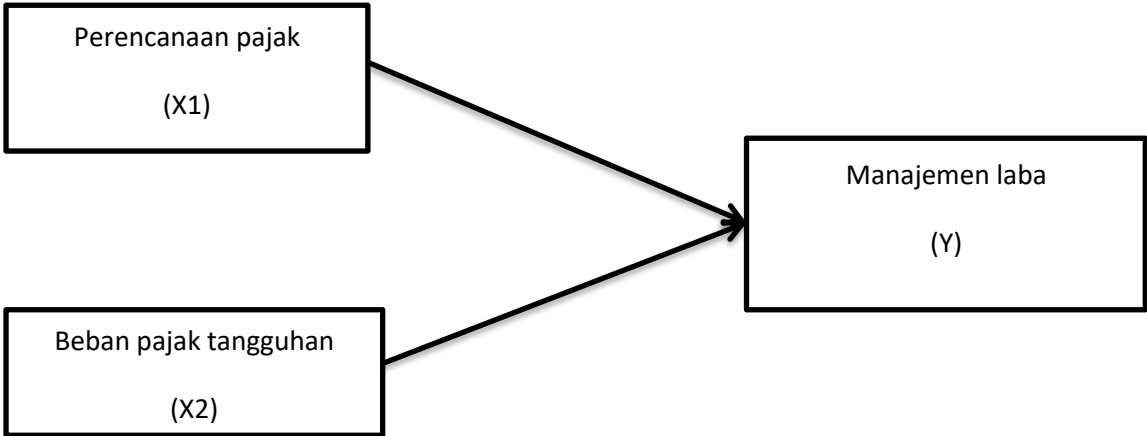
				manajemen laba.
2	(Yunila & Aryati, 2018)	pengaruh perencanaan pajak dan pajak tangguhan terhadap manajemen laba dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2016	Objek : Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2014-2016 Variabel: IV :perencanaan pajak dan pajak tangguhan DV: Manajemen Laba MD: Kualitas Audit	1.perencanaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba dan kualitas audit memperlemah pengaruh antara perencanaan pajak dengan manajemen laba. 2.pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan kualitas audit tidak dapat memperlemah hubungan antara pajak tangguhan dengan manajemen laba.
3	(Citra Fitriany, 2016)	Pengaruh Aset Pajak Tangguhan,Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013)	Objek: Perusahaan Manufaktur yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011-2013 Variabel: IV: Aset Pajak Tangguhan, Beban	Variabel independen aset pajak tangguhan dan perencanaan pajak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap

			Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak DV:Managemen Laba	manajemen laba, sedangkan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
4	(Prasetyo et al., 2019)	Pengaruh perencanaan pajak,beban pajak tangguhan dan kualitas audit terhadap manajemen laba(perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017)	Objek : perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI Variabel: IV :perencanaan pajak,beban pajak tangguhan dan kualitas audit DV: Manajemen laba	1.perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba 2.beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 3.kulaitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba
5	(Ainaul Maslihah, 2019)	Pengaruh profitabilitas,aktiva pajak tangguhan,perencanaan pajak dan leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang <i>listing</i> di BEI tahun 2013-2017	Objek : perusahaan manufaktur yang listing di BEI Variabel : IV : profitabilitas,aktiva pajak,dan leverage DV : manajemen laba	1.profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 2.aktiva pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 3.perencanaan

				pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba 4.leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
--	--	--	--	---

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran ini dapat digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun kerangka pemikiran ini digambarkan pada model berikut ini :



Gambar 2.1 kerangka konseptual peneltian

Keterangan:

 : Pengaruh interaksi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen

X1 dan X2 : variabel independen(variabel bebas)

Y : variabel dependen(variabel terikat)

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

3.1. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Perusahaan menganggap bahwa dalam pembayaran pajak yaitu sebagai beban, sehingga manajer berusaha mencari cara untuk meminimalkan beban tersebut sekecil mungkin agar dapat memperoleh laba yang maksimal. Selain itu juga Manajemen laba merupakan suatu tindakan yang memanipulasi keuntungan dengan cara mengatur penyusunan laporan keuangan dengan memanfaatkan prinsip akuntansi.

Maka semakin tinggi laba yang diterima maka semakin tinggi juga pelaksanaan perusahaan menerapkan perencanaan pajak dengan cara manajemen laba sehingga laba yang diterima perusahaan tidak berkurang. Menurut hasil penelitian (Erawati & Lestari, 2019) bahwa hasil hipotesis perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis dapat dibuat sebagai berikut:

H1 : Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba

3.2. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Beban pajak tangguhan merupakan beban pajak yang ditangguhkan karena adanya perbedaan waktu yang dapat mengakibatkan perbedaan antara laba menurut komersial dan laba menurut fiskal. Beban pajak tangguhan dapat menimbulkan kewajiban sehingga perusahaan dapat menunda pembayaran pajak pada periode tertentu, maka laba perusahaan akan lebih besar pada saat pelaporan periode yang bersangkutan tersebut.

Sedangkan manajemen laba adalah suatu strategi yang mensiasati beban pajak tangguhan atas penundaan pembayaran. Apabila manajer melakukan manajemen laba

semakin besar maka semakin besar pula perbedaan laporan keuangan menurut komersial dan fiskal.

Menurut hasil penelitian (Suputra, 2017) membuktikan bahwa Beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dapat dibuat sebagai berikut:

H2 : Beban Pajak Tangguhan Berpengaruh positif Terhadap Manajemen Laba

.